



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

*PANGKALAN PENGAWASAN SDKP
JAKARTA*

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renstra Pangkalan PSDKP Jakarta Periode 2014 – 2019. Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta berpedoman terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen PSDKP.

Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan periode tahun 2020-2024. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, partisipasi seluruh pegawai dengan memperhatikan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satuan Pengawasan (Satwas) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Jakarta, 10 Agustus 2020
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Sumono Darwinto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	5
1. Potensi	5
2. Permasalahan.....	9
C. Lingkungan Strategis	10
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
A. Visi, Misi dan Tujuan	14
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	15
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17
B. Kebijakan Pengarusutamaan	19
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan.....	21
BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
A. Indikator Kinerja Kegiatan.....	23
B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan.....	23
BAB 5. PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	26
1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA TAHUN 2020-2024. Error! Bookmark not defined.	
2. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA TAHUN 2020-2024.....	27

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta bertugas untuk melaksanakan kegiatan dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta beserta Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi:

- a. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan penerbitan Form Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) ; dan

- c. Pelayanan penerbitan Form 3 dan Form 6 sebagai syarat dalam Penerbitan dan Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) oleh Direktorat Pemantauan dan Operasional Armada.

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau, diantaranya sebagai berikut :

Pada periode 2015-2019, Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung pada pencapaian 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 16 (enam belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian di akhir periode Renstra sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta di akhir periode Renstra 2015-2019

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian	Status
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU1 Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha)	4500	5115	114,00 %	
IKU2 Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundang-undangan (Unit Usaha)	50	296	120,00 %	
INTERNAL PROSES PERSPECTIVE				
SS2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif				
IKU3 Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi (Unit)	4	4	100,00 %	
IKU4 Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Hari)	92	98	106,00 %	
IKU5 Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubberboat lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Hari)	44	44	100,00 %	
IKU6 Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Kasus)	5	5	100,00 %	
IKU7 Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Kasus)	5	5	100,00 %	
IKU8 Jenis Ikan dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jenis Ikan)	5	7	120,00 %	
IKU9 Jumlah kelompok pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya	2	3	120,00 %	

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian	Status
kelautan dan perikanan (Kelompok)				
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS3 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, professional dan berintegritas				
IKU10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	71	71,05	100,00%	
SS4 Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses				
IKU11 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80	92,5	115 %	
SS5 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima				
IKU12 Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100,00 %	
IKU13 Level Maturitas SPIP Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta	Level 3 (3)	Level (3,50)	120,00 %	
IKU14 Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta berpredikat menuju WBK (Unit)	1	1	100,00 %	
IKU15 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	100	100	100%	
IKU16 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100%	
SS6 Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien dan akuntabel				
IKU17 Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik 89	93,61	104,00 %	
IKU18 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Jakarta dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta TA. 2018 (%)	1	0,01	100,00%	

Di antara IKU yang ditargetkan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat 8 (delapan) IKU teknis bidang PSDKP yang ada di Pangkalan PSDKP Jakarta, antara lain:

- 1) Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha);
- 2) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha);
- 3) Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Hari);
- 4) Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Hari);

- 5) Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Kasus);
- 6) Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (Kasus);
- 7) Jenis Ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jenis Ikan);
- 8) Jumlah kelompok pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Kelompok).

Seluruh IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 selalu tercapai pada setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya.

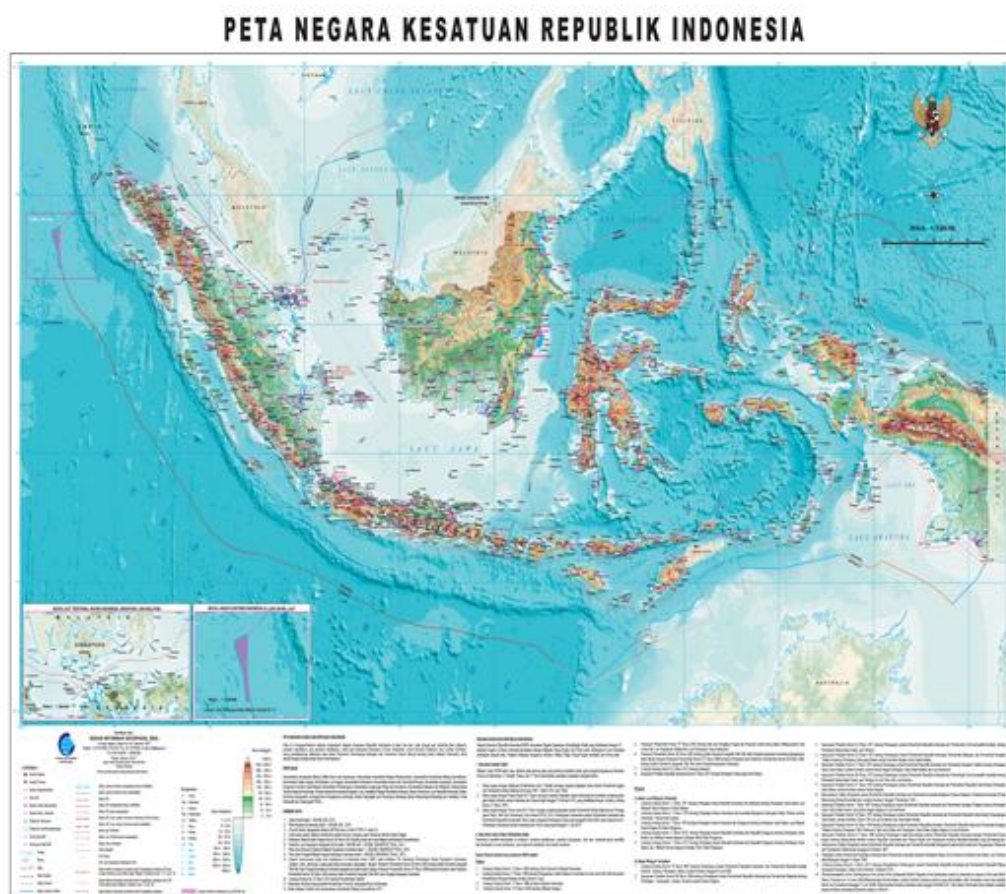
Sedangkan di luar IKU teknis Pangkalan PSDKP Jakarta terdapat 10 (sepuluh) IKU yang mampu mencapai target pada akhir periode Renstra 2015-2019 yang telah dicanangkan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa aspek-aspek administratif yang bersifat dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta telah dipenuhi secara memadai. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat.

Upaya yang telah dilakukan Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi

laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah “**Pengawasan**” yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara ilegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan di wilayah .

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta meliputi 4 (empat) Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI. Jakarta, dan Jawa Barat yang meliputi wilayah Samudera Hindia Barat Sumatera (WPP NRI 572), Samudera Hindia Selatan Jawa (WPP NRI 573) dan Laut Jawa (WPP NRI 712) memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, hal tersebut didukung dengan letak geografis wilayahnya. Usaha bidang perikanan baik itu budidaya, pengolahan hasil perikanan maupun usaha penangkapan ikan dapat berkembang dengan cepat di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta karena didukung dengan distribusi dan kemudahan transportasi. Selain itu, letak geografis berhadapan langsung dengan Samudera Hindia Barat Sumatera (WPP NRI 572), Samudera Hindia Selatan Jawa (WPP NRI 573) dan Laut Jawa (WPP NRI 712) dengan potensi hasil tangkapan ikan dengan nilai ekonomis tinggi menambah nilai penting bahwa potensi perikanan tangkap di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Selain potensi perikanan, perairan Jawa juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar yang dimanfaatkan melalui ekowisata bahari, pemanfaatan ikan dan karang hias, pengambilan BMKT, penambangan pasir, dll.



Gambar 2. Komposisi ASN Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Jakarta didukung oleh 149 (seratus empat puluh sembilan) orang sumber daya manusia dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Pangkalan PSDKP Jakarta secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta.



Gambar 3. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas yang diad-hock ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa serta perairan teritorial yang tersebar di Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari Provinsi Lampung sampai Propinsi Jawa Barat. Yang tersebar pada beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 mencakup Perairan Jawa Barat dan Banten dan WPP 573 mencakup Perairan Samudera Hindia bagian Selatan Jawa.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Jakarta terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan tipe D, 3 (tiga) unit *speedboat* Pengawas ukuran 12 m, 2 (dua) unit *speedboat* Pengawas ukuran 8 m, 1 (satu) unit *Rubber Boat*, 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat* dan 1 (satu) unit searider yang tersebar di Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta

No.	Jenis Sarpras	Unit
1.	Kapal Pengawas Perikanan	
	Kapal Pengawas (28 Meter)	1
	Napoleon (12 Meter)	3
	Dolphin (8 Meter)	2
	RIB 1 (8 Meter)	1
	RIB 2 (6 Meter)	1
	Rubber Boat (5 Meter)	1
2.	Bangunan PSDKP	
	Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta	1
	Gedung Arsip	1
	Kantor Satwas SDKP	5
	Kantor Wilker PSDKP	2
	Mess Operator	3

Dalam hal prasarana (infrastruktur), Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki 1 (satu) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan Gedung utama, 1 (satu) unit gedung arsip, 5 (lima) unit kantor Satuan Pengawasan dan 2 (dua) unit kantor Wilker Pengawasan. Pangkalan PSDKP Jakarta juga memiliki 2 unit Garasi Speedboat, Gedung Mess, Gudang barang bukti. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah *Regional Monitoring Center (RMC)*. Pengoperasian RMC mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System (VMS)* sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi penencegatan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 136 Pokmaswas yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pemerintah Daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu: sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Potensi lain yang dimiliki Pangkalan PSDKP Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Pangkalan PSDKP Jakarta selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama dengan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Jakarta kedepan yang penerapannya akan mendapatkan tantangan dan permasalahan yang sangat berat.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu :

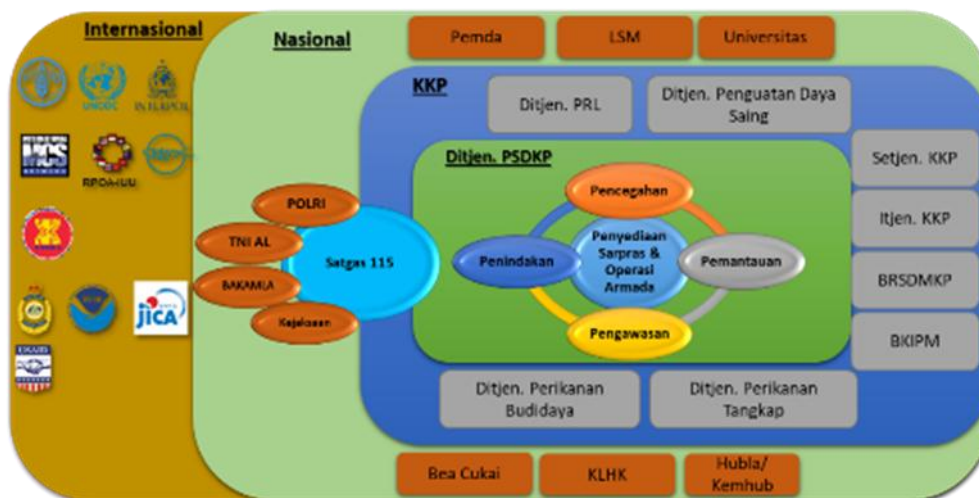
- a. Kegiatan Kapal Ikan Indonesia [KII];

- b. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak [*destructive fishing*];
- d. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. Sumber Daya Manusia [SDM] Pengawasan SDKP masih terbatas;
- f. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas;
- g. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal;
- h. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia;
- i. Penegakkan hukum [*law enforcement*] belum konsisten; dan
- j. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional (Gambar 4)



Gambar 4. Lingkungan Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai **Visi Indonesia 2045** yaitu **Indonesia Maju**. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah **Visi Presiden 2020-2024** yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"** yang dijabarkan ke dalam Misi Presiden sebagaimana Nawacita II, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan jasa kelautan.
- 2) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan keamanan laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut

dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing dengan menggunakan kapal pengawas dan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target 1 sistem sampai tahun 2024;
- 2) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 120 hari operasi setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
- 3) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi target: 50 hari operasi (tahun 2020 - 2024);
- 4) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2020-2024).
- 5) Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2020-2024)

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024:

“Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan **Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024**, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

Adapun Misi Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.

B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Visi Pangkalan PSDKP Jakarta maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta;
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta;
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta;
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024 yang dirumuskan berdasarkan hubungan kerangka logis dengan Sasaran Program pada lingkup Ditjen. PSDKP dan Sasaran Strategis pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3. Untuk mengukur sejauh mana Sasaran Kegiatan tersebut berkinerja, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 4.

Tabel 3. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP, Sasaran Strategis Program Ditjen. PSDKP dan Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP	Sasaran Program Ditjen. PSDKP	Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta	Keterangan
SS-1	Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Penyelenggaraan sistem pengawasan berbasis masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta akan mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP sehingga ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat KP, khususnya dalam aspek sosial kelembagaan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
			Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Terselenggaranya Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Penyelenggaraan pemantauan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
			Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.	Penyelenggaraan operasi armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
			Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.	Penyelenggaraan pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Terselenggaranya penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta akan mendukung peningkatan Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP sehingga ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 pada lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - c. Membangun pola karir PNS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Membangun sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai lingkup Pangkalan PSDKP

Jakarta;

- c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - b. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - c. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.
- 5) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan” lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta;

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

B. Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung Ditjen. PSDKP memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung Ditjen. PSDKP berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung Ditjen. PSDKP dengan menguraikan komponen pembentuk sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

d. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan

transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dilakukan melalui: (1) penggunaan media komunikasi dalam optimalisasi pelayanan publik, monitoring dan pelaporan pengawasan SDKP (2) Pemanfaatan *Information Technology* (Media Sosial Elektronik) untuk penyadartauan dan informasi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta disajikan dalam Gambar 2.

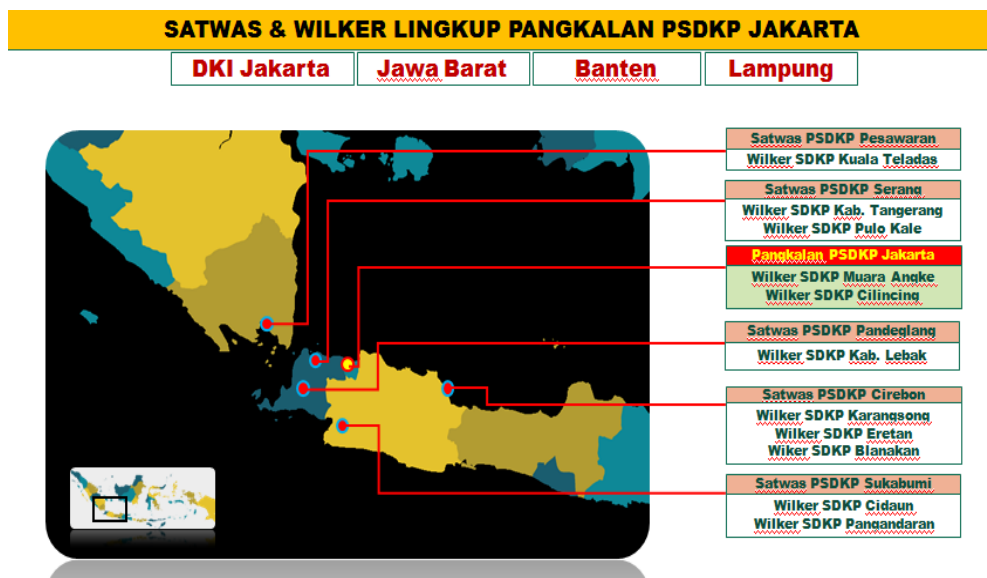


Gambar 2. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 (lima) Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 4 :

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Tabel 4. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

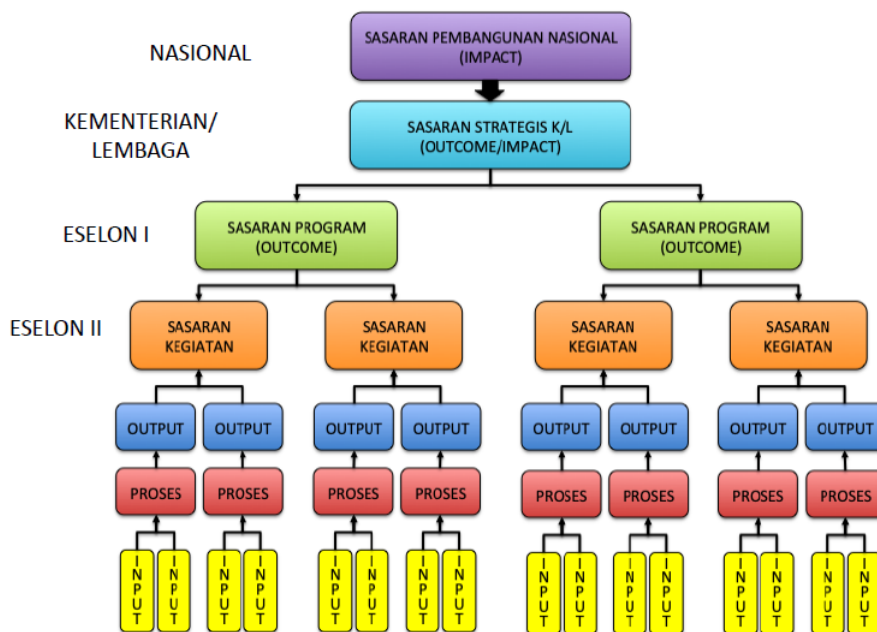


Gambar 3. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II dan UPT lingkup DJ-PSDKP yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP (generik). Matriks Indikator kinerja kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024 sebagaimana dilampirkan pada lampiran 2.



Gambar 3. Struktur Kerangka Logis dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi

KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi output kegiatan beserta target volume dan pendanaannya. Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung pada beberapa output kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dijabarkan pada matriks Lampiran.

BAB 5. PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Reviu Renstra dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pencapaian Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di Pangkalan PSDKP Jakarta, Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Sumono Darwinto

LAMPIRAN

MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA												Daerah	Pangkalan PSDKP Jakarta
Kegiatan: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan												Daerah	Pangkalan PSDKP Jakarta
SS-1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat												
IK-1	<i>Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	70	71	72	73	75	13.100	12.600	15.000	17.000	20.000		
SS-2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP												
IK-2	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	0,4	0,42	0,45	0,46	0,48	15.602.537	10.612.009	10.800.000	11.000.000	11.500.000		
IK-3	<i>Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	0,104	0,106	0,11	0,15	0,2	1.028.446	1.926.498	2.100.000	2.200.000	2.300.000		
SS-3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP												
IK-4	<i>Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)</i>	1	2	2	2	2	4.304.138	3.202.265	3.500.000	3.800.000	4.000.000		
IK-5	<i>Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)</i>	8	8	8	9	9	1.028.446	624.090	650.000	850.000	890.000		

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SS-4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP												
IK-6	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)</i>	90	150	150	170	180	15.602.537	10.612.009	11.000.000	11.200.000	11.500.000		
IK-7	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)</i>	180	180	180	190	200	1.028.446	1.926.498	2.000.000	2.100.000	2.200.000		
IK-8	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)</i>	90	120	125	125	125	15.602.537	10.612.009	10.800.000	11.100.000	11.300.000		
IK-9	<i>Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)</i>	25	42	42	45	50	1.028.446	1.926.498	2.100.000	2.300.000	2.500.000		
IK-10	<i>Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (orang)</i>	17	24	24	24	24	51.300	32.400	35.000	37.000	39.000		
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan												Daerah	Pangkalan PSDKP Jakarta
SS-5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan												
IK-11	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	100	100	100	100	100	96.475	49.250	52.000	54.000	56.000		

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
IK-12	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	93	93	93	70.500	8.480	8.600	8.800	9.000			
IK-13	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	93	93	93	45.000	33.600	35.000	37.000	39.000			
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan												Daerah	Pangkalan PSDKP Jakarta	
SS-6	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan													
IK-14	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]	15	20	25	30	35	487.250	602.500	620.000	640.000	660.000			
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan												Daerah	Pangkalan PSDKP Jakarta	
SS-7	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan													
IK-15	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100	100	100	1.123.902	1.931.684	2.000.000	2.100.000	2.200.000			
Program: Dukungan Manajemen												Pusat dan Daerah	Ditjen. PSDKP	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP													Daerah	Pangkalan PSDKP Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SS-8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta												
IK-16	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]</i>	72	72	72	72	72	87.700	87.700	88.000	88.700	89.000		
IK-17	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]</i>	82	82	82	82	82							
IK-18	<i>Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	100	100	100	100	100							
IK-19	<i>Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	100	100	100	100	100	564.798	573.800	580.000	590.000	600.000		
IK-20	<i>Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)</i>	100	100	100	100	100	17.783.023	16.356.523	16.800.000	17.000.000	17.200.000		
IK-21	<i>Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [%]</i>	100	100	100	100	100							
IK-22	<i>Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [%]</i>	100	100	100	100	100							
IK-23	<i>Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [%]</i>	100	100	100	100	100							
IK-24	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]</i>	80	80	80	80	80							
IK-25	<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</i>	<i>Naik [88]</i>	<i>Naik [88]</i>	<i>Naik [88]</i>	<i>Naik [88]</i>	<i>Naik [88]</i>							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IK-26	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Jakarta dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta TA. 2019 [%]	1	1	1	1	1							

1. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA TAHUN 2020-2024

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA												
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
Pemantauan dan Operasi Armada												
	Operasional Kapal Pengawas	90	120	130	140	150	15.602.537	10.612.009	10.800.000	11.000.000	11.500.000	
	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	17	24	24	24	24	51.300	32.400	35.000	37.000	39.000	
	Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi	12	10	10	10	10	5.332.584	3.826.355				
	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	25	42	42	45	50	1.028.446	1.926.498	2.000.000	2.100.000	2.200.000	
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1	1	1	1	1	13.100	12.600	15.000	17.000	20.000	
	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	1	2	1	1	1	4.174.837	1.285.123	1.485.123	1.685.123	2.000.000	
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan											
	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel	3	2	2	2	2	96.475	49.250	50.000	51.000	52.000	

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel	3	2	2	2	2	70.500	42.080	44.080	46.080	48.080	
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan											
	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan	3	3	3	3	3	45.000	50.000	53.000	56.000	60.000	
	Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan	12	15	15	16	18	140.00	140.000	150.000	160.000	180.000	
	Unit Usaha Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Ruang Laut Nasional	18	10	11	12	13	125.750	126.500	128.500	130.000	131.000	
	Pengawasan Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan	6	26	27	28	29	93.250	218.000	200.000	210.000	220.000	
	Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destruktive Fishing	18	25	27	29	31	85.000	68.000	70.000	72.000	74.000	
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan											
	Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	3.374	3.825	3.925	4.025	4.125	606.833	816.000	820.000	824.000	826.000	
	Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	88	95	96	97	98	133.820	328.542	340.000	360.000	380.000	
	Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	94	91	92	93	94	147.000	457.000	470.000	490.000	500.000	
	Usaha Distribusi Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	116	86	87	88	89	236.249	330.142	350.000	370.000	390.000	
	Program Dukungan Manajemen											
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Jakarta											
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	564.798	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1	651.676	-	-	-	-	
	Layanan Perkantoran	1	2	1	1	1	17.783.023	16.356.523	16.500.000	16.700.000	17.000.000	